

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan.

Dinamika hubungan sipil dan militer pada masa Demokrasi Liberal (1950-1959) sangat menarik untuk dikaji. Militer adalah organ yang penting yang dimiliki oleh negara, guna mempertahankan bangsa dari ancaman baik dari luar maupun dari dalam. Pada masa Demokrasi Liberal militer berada di bawah supremasi sipil. Sistem Demokrasi Liberal menyebabkan berkembangnya partai-partai politik di Indonesia sehingga berdampak pada usia kabinet.

Pada masa Kabinet Natsir hubungan sipil dan militer berjalan dengan baik, tapi pada tahun 1952 muncul pertikaian pandangan antara sipil dan militer pada masa Kabinet Wilopo dengan meletusnya peristiwa 17 Oktober 1952. Dampak dari peristiwa 17 Oktober menyebabkan militer terbagi kedalam dua golongan yaitu golongan yang pro 17 Oktober dan anti 17 Oktober. Peristiwa 17 Oktober ini merupakan salah satu latar belakang dari peristiwa 27 Juni 1955. Peristiwa 17 Oktober merupakan aksi protes militer terhadap pemerintahan sipil terutama kepada parlemen. Peristiwa 17 Oktober salah satu penyebab jatuhnya Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo digantikan oleh Kabinet Ali. Yang menjabat Menteri Pertahanan pada masa Kabinet Ali adalah Iwa Kusumasumantri, pada masa Iwa Kusumasuamntri menjabat keretakan dalam tubuh militer semakin besar.

Keretakan dalam tubuh militer semakin besar kelompok pro dan anti 17 Oktober mengadakan serangkaian pertemuan untuk menciptakan kembali

Anny Wahyuni, 2013

Peristiwa 27 Juni 1995 Kajian Tentang Hubungan Sipil Dan Militer Pada Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kesatuan militer. Pada tanggal 17 Februari 1955 militer berhasil melaksanakan serangkaian pertemuan. Pertemuan ini berlangsung di daerah Yogyakarta, pertemuan ini berakhir pada tanggal 25 Februari 1955 dengan menghasilkan resolusi yang diterima oleh seluruh perwira yang hadir dan disahkan oleh KSAD Bambang Sugeng. Isi dari Piagam Yogyakarta adalah:

1. Menekankan bahwa korps perwira akan selalu mempertahankan persatuan dan profesionalisme di dalam tubuh TNI-AD, tidak membenarkan campur tangan politik didalam masalah militer yang didasarkan atas senioritas dan kecakapan.
2. Korps perwira TNI-AD akan mematuhi segala keputusan yang diambil oleh pemerintah bersama-sama Dwitunggal (Soekarno-Hatta).
3. Peristiwa 17 Oktober dianggap tidak pernah terjadi dan meminta kepada pemerintah sebelum peringatan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1955 pemerintah sudah menyelesaikan secara formil mengenai peristiwa tersebut.

Pada tanggal 2 Mei 1955 setelah terjadi KAA, Kolonel Bambang Sugeng mengajukan permintaan mengundurkan diri kepada Kabinet Ali dengan alasan selama tiga bulan kurang mampu melaksanakan resolusi dari piagam Yogyakarta. Kabinet menerima pengunduran Bambang Sugeng. Karena pengunduran Bambang Sugeng sebagai KSAD pemerintah akhirnya memutuskan mengangkat Kolonel Bambang Utoyo sebagai KSAD, pengangkatan Bambang Utoyo sebagai KSAD oleh pemerintahan secara sepihak menyebabkan permasalahan lagi dengan TNI-AD karena menyalahkan hasil dari resolusi Yogyakarta. Pada tanggal

27 Juni 1955 Presiden resmi melantik Bambang Utoyo sebagai KSAD. Pimpinan dari TNI-AD yang di undang melakukan pemboikotan atas perintah Zulkifli Lubis. Peristiwa 27 Juni 1955 merupakan peristiwa yang mencoreng pemerintahan militer khususnya Angkatan Darat dalam perjalanan militer Indonesia. Atas aksi Kolonel Zulkifli Lubis ia di pecat dari jabatannya. Peristiwa pemboikotan yang dilakukan oleh Kolonel Zulkifli Lubis merupakan cerminan dari kegagalan pemerintahan Kabinet Ali.

Pemerintah dan militer sama-sama mengajukan syarat untuk mengakhiri krisis yang terjadi antara sipil dan militer. Tapi kedua belah pihak tidak ada yang mau mengalah sehingga sementara waktu penyelesain tentang peristiwa 27 Juni 1955 tidak ada penyelesaian sampai Kabinet Ali jatuh. Kabinet Ali digantikan oleh Kabinet Burhanudin Harahap. Pada masa kabinet inilah diambil keputusan dan kebijakan menghentikan Bambang Utoyo sebagai KSAD dengan mengangkat Nasution sebagai KSAD yang baru serta mencabut pemecatan terhadap Kolonel Zulkifli Lubis dan menyatakan peristiwa 17 Oktober resmi telah selesai.

Kabinet Burhanudin Harahap tidak memerintah dalam waktu yang cukup lama dan digantikan oleh Kabinet Ali yang dikenal dengan kabinet Ali II. Beberapa bulan Kabinet Ali II menjalankan pemerintahan bermunculan banyak krisis baru yaitu:

1. Hasil pemelihan umum tidak sesuai dengan yang diharapkan.
2. Korupsi semakin merajalela dan Sentimen kesukuan semakin jelas.
3. Keadaan ekonomi semakin merosot.

4. Hubungan dengan Belanda semakin memburuk disebabkan penolakan Belanda menyerahkan Papua ke Indonesia.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada masa Kabinet Ali II menyebabkan terjadinya protes-protes di daerah luar Jawa karena merasa terabaikan dan tidak di perhatikan. Sehingga berdampak terjadinya penyelundupan di daerah daerah luar Jawa. Pemerintah militer di daerah memberikan alasan terbuka bahwa dengan penyelundupan ini bisa mencukupi kebutuhan para perwira serta mensejahterakan daerah. Pembebasan terhadap Ruslan Abdul Gani yang dilakukan oleh Ali dan KSAD Nasution menyebabkan keretakan hubungan Nasution dengan Zulkifli Lubis, Kolonel Zulkifli Lubis menyatakan bahwa Perdana Menteri Ali serta Nasution membantu dan melindungi kejahatan dan yang dilakukan oleh Ruslan Abdul Gani.

Muchtar Lubis seorang wartawan ikut memberitakan tentang Korupsi yang dilakukan oleh Ruslan Abdul Gani disertakan bukti dokumen. Masalah-masalah yang terjadi pada masa Kabinet Ali II mendapatkan kritikan yang tajam berdampak kepada kepercayaan terhadap pemerintahan Kabinet Ali semakin menurun. Ditambah dengan pengunduran diri Mohammad Hatta dari jabatannya sebagai Wakil Presiden pada tanggal 1 Desember telah memperhebat kekecewaan dan kebencian daerah-daerah di luar Jawa, terutama Sumatera terutama pada pemerintahan pusat dan khususnya terhadap Presiden Soekarno.

Daerah akhirnya tidak mengakui lagi kabinet Ali II dan pemerintah pusat serta memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat, pergolakan yang terjadi di daerah di tangani dengan cara gencatan senjata yang mempergunakan Angkatan

Udara. KSAD Nasution melakukan tindakan yang lebih lunak serta melakukan kunjungan ke Sumatera dan mengadakan pertemuan (perundingan). Tindakan KSAD Nasution ini semata-mata bersifat politis dalam rangka menjalankan kebijaksanaan untuk memelihara status quo dalam hubungan sipil-militer mengingat keadaan TNI masih dalam politik yang lemah.

Kabinet Ali II sudah tidak sanggup lagi menghadapi tantangan serta tuntutan yang saling bertentangan. Pada tanggal 14 Maret 1957 sesaat sebelum Ali menyerahkan mandatnya kembali ke Presiden. Perdana Menteri menandatangani sebuah dekret. Sesudah kabinet Ali jatuh Presiden Soekarno menunjuk Suwirjo dari PNI sebagai formatur untuk pembentukan Kabinet baru sesuai keinginan Presiden tetapi Suwirjo tidak berhasil membentuk Kabinet, sehingga Presiden Soekarno menunjuk dirinya sebagai formatur dengan alasan darurat perang. Pada bulan April, Soekarno berhasil membentuk kabinet yang sesuai dengan keinginannya. Kabinet itu diberi nama Kabinet Kerja dengan perdana Menteri Ir. Djuanda Kartawidjaja yang program kerjanya dari Presiden Soekarno. Banyaknya kejadian telah menunjukkan bahwa militer telah dijadikan landasan oleh pemerintah, bukan lagi partai-partai politik dan parlemen. Pembentukan Kabinet Kerja mengurangi peranan parlemen dan partai dalam perkembangannya serta naiknya peranan politik Presiden dan TNI-AD.

Dengan keadaan seperti ini Nasution mendapat kesempatan yang besar buat TNI untuk lebih memasuki arena perpolitikan. Nasution juga mengatakan bahwa angkatan bersenjata bukan semata-mata alat bagi pemerintahan. Nasution juga menyarankan untuk mengganti sistem Demokrasi Liberal kembali ke UUD 1945

Anny Wahyuni, 2013

Peristiwa 27 Juni 1995 Kajian Tentang Hubungan Sipil Dan Militer Pada Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

untuk kesatuan bangsa Indonesia. Pada bulan Juli 1959 secara resmi Soekarno mengembalikan negara dibawah naungan Undang-Undang Dasar 1945 dan Soekarno mengumumkan konsepsinya bahwa negara memakai sistem pemerintahan baru dengan kabinet gotong royong. Dengan berlakunya dekrit keterlibatan militer beserta wakil-wakilnya dalam politik dan lembaga politik meluas dengan cepat.

B. Rekomendasi

Berdasarkan temuan dalam skripsi yang berjudul “Peristiwa 27 Juni 1955: Kajian Tentang Hubungan Sipil Dan Militer Pada Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)” peneliti memberikan rekomendasi bahwa skripsi peneliti memiliki Keterhubungan dengan SK yaitu Menganalisis perjuangan bangsa Indonesia sejak proklamasi hingga lahirnya orde baru dengan KD yaitu Menganalisis perkembangan politik dan ekonomi serta persatuan masyarakat di Indonesia dalam upaya mengisi serta mempertahankan kemerdekaan mata pelajaran sejarah SMA kelas XI IPA semester dua dan kelas XII IPS semester satu, fokus pada bidang politik pada masa demokrasi terpimpin.